KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

#							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 6 2 5  H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A IDENTITAS DE	NERIMA PENGHASIL	AN YANG DIPOTONG	- <del>-</del>				
A.1 NPWP : 7 2 4 6 9 9 5 7 4 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : MULIANA							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01	8.496.100	8.496.100	0	5	424.805	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota  B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy  B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.  Nomor : Tanggal dd mm yyyyy  B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit C	Organisasi :						
C.4 Tanggal :		2 6 dd 0 1 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :		HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yan elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajał rlukan tanda tangan.	r mengatur bahwa c	lokumen ini tela	ah ditandatangani secara	

L10JGXTN